

## Analisis Konten Youtube sebagai Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah.

**Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno<sup>1</sup>, Fairuz Sabiq<sup>2</sup>,  
Muh Nashirudin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta,  
Surakarta, Indonesia)

[anisyatulhударani28@gmail.com](mailto:anisyatulhударani28@gmail.com), [fairuzsabiq@yahoo.co.id](mailto:fairuzsabiq@yahoo.co.id),

[muh.nashirudin@iain-surakarta.ac.id](mailto:muh.nashirudin@iain-surakarta.ac.id)

### **ABSTRACT**

*After the promulgation of Government Regulation Number 24 of 2022, copyright should be a breath of fresh air. However, the response given by financial institutions was only supportive and they did not have the courage to implement YouTube content as collateral. The method used in this research is the juridical-normative research method. The approach used in this research is the statutory approach. The data analysis technique used is the theory of Miles and Huberman, where there is data reduction, data presentation and conclusion. The government facilitates calculation assistance for intellectual property, but there are still many gaps in the application of these regulations. So we need a system or standard rules that regulate explicitly how to evaluate intellectual property economically. There are still many shortcomings in implementing Youtube content as a fiduciary guarantee, so additional regulations and a qualified system are still needed if you want to apply copyright as a fiduciary guarantee.*

**Keywords:** *Collateral, Fiduciary, Youtube*

### **ABSTRACT**

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 seharusnya menjadi angin segar mengenai hak cipta. Namun respon yang diberikan oleh lembaga keuangan hanya bersifat mendukung dan belum berani untuk mengimplementasikan konten youtube sebagai jaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teori Miles dan Huberman, dimana terdapat reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemerintah memfasilitasi bantuan perhitungan untuk kekayaan intelektual, namun dalam penerapan peraturan tersebut masih memiliki banyak celah. Sehingga diperlukan sistem atau aturan baku yang mengatur dengan eksplisit bagaimana menilai secara ekonomis tentang kekayaan intelektual. Pengimplementasian konten Youtube sebagai jaminan fidusia masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih perlunya peraturan tambahan dan sistem yang mumpuni apabila ingin menerapkan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

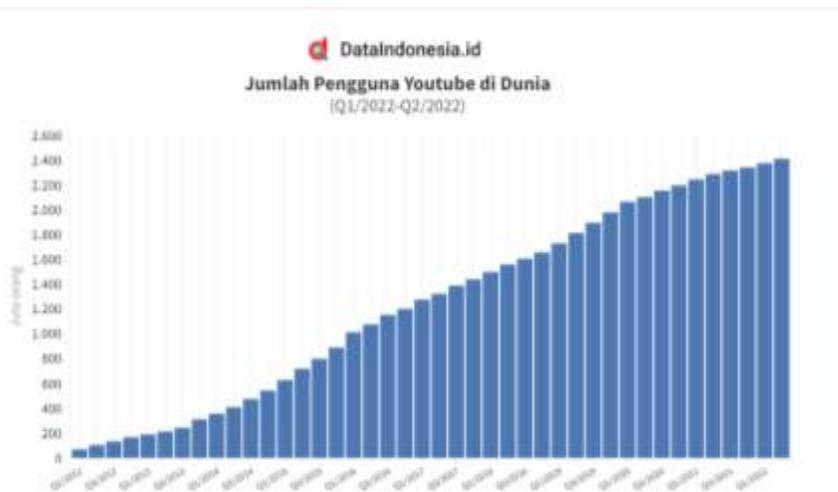
**Keywords:** *Jaminan, Fidusia, Youtube*

### **PENDAHULUAN**

Youtube menjadi salah satu platform untuk saling terhubung melalui video, yang memungkinkan seluruh orang di dunia berbagi informasi melalui unggahan video. Data dari Business of apps pengguna aktif media sosial Youtube terus meningkat, sebanyak 2,29 miliar pengguna pada kuartal II tahun 2021 kemudian meningkat menjadi 2,41 miliar pada kuartal yang sama pada tahun 2022, meningkat sekitar 5,24%<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Dimas Bayu, "Jumlah Pengguna Youtube Di Dunia," Dataindonesia.id, 2022, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-youtube-di-dunia-capai-241-miliar-pada-kuartal-II2022>.



Gambar. 1 jumlah pengguna youtube di Indonesia

Total dari 267 juta penduduk Indonesia, pemakaian sosial media youtube mencapai 139 juta pengguna dengan target pasar sebesar 21,42% per April 2022. Pengguna youtube dapat dikatakan mencapai 50% dari penduduk Indonesia. Indonesia sebagai pengguna youtube terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat menurut data yang diambil dari *We Are Social*<sup>2</sup>. Bahkan pada tahun 2022 menurut Yudi Yudhawan Vice President Youtube Apac Gautam Anand youtube telah berkontribusi terhadap PDB Indonesia yang jumlahnya mencapai 7,5 triliun.

Peningkatan pengguna youtube sejalan dengan meningkatnya kebutuhan konten untuk dikonsumsi. *Forbes.com* menyebutkan jumlah konten kreator youtube mencapai 13 juta konten kreator, dengan spesifikasi 1 juta konten kreator yang sudah profesional dan 12 juta konten kreator yang baru ataupun sedang merintis<sup>3</sup>. Peningkatan penggunaan youtube bukan hanya karena manfaat yang didapatkan dari youtube yang beragam, melainkan karena youtube juga dapat dimonetisasi. Youtube juga mendapatkan penghasilan karena aplikasi buatannya digunakan, pendapatan yang didapatkan youtube bersifat fluktuatif. Pada kuartal II tahun 2022 youtube mengantongi hingga mencapai US\$ 7,34 miliar<sup>4</sup>.

Upaya youtube mendukung pemenuhan kebutuhan konten diwujudkan dengan memberikan pemasukan kepada konten kreator yang telah memenuhi

<sup>2</sup> Andi Dwi Riyanto, "Data Digital Indonesia Tahun 2022," Kompasiana, 2022, <https://www.kompasiana.com/andidwiryanto/620fe14651d76471ad402f76/data-digital-indonesia-tahun-2022>.

<sup>3</sup> Muhammad Alawa Patonah, "Risiko Menjadi Konten Kreator Youtube Di Era Sekarang," Kompasiana, 2022, <https://www.kompasiana.com/mohammadalawapatonah1723/61e45ce480a65a0983513884/risiko-menjadi-konten-kreator-youtube-di-era-sekarang>.

<sup>4</sup> Cindy Mutia Annur, "YouTube Kantongi Pendapatan US\$7,34 Miliar Pada Kuartal II-2022," Katadata.co.id, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/18/youtube-kantongi-pendapatan-us734-miliar-pada-kuartal-ii-2022>.

standar monetisasi youtube. Pendapatan per seribu/*revolutions per minute* (RPM) merupakan laporan pendapatan di Youtube Analytics yang meliputi iklan, youtube premium, langganan channel, super chat dan super stickers. *revolutions per minute* adalah pendapatan aktual yang diperoleh konten kreator setelah pembagian keuntungan. Penghitungan *revenue per impression* youtube (penghasilan/ jumlah tampilan halaman) dikali 1000. Semisal seorang youtuber memiliki kisaran 1.000 *subscriber* maka mendapatkan gaji sekitar Rp. 70.000 (pendapatan berdasarkan US\$ dan bersifat fluktuatif) perbulan <sup>5</sup>.

Perkembangan masif yang terjadi pada teknologi informasi, ekonomi kreatif serta komunikasi menuntut Indonesia mengembangkan serta memperbaharui peraturan-peraturan yang mendukung dan menjamin seluruh kepentingan *stakeholder*. Salah satu aspek yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif yaitu hak cipta. Hak kekayaan intelektual atau secara internasional disebut dengan *intellectual property right* termasuk dalam hak milik individu, yang objeknya mempunyai hak kebendaan terhadap sesuatu yang tidak berwujud (*intangible right*) <sup>6</sup>. Eddy damian berpendapat bahwa ekonomi kreatif telah membawa pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi rakyat secara khusus <sup>7</sup>.

Ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 pada 12 Juli 2022 yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Menurut Angela Tanoesoedibjo selaku Wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan hadirnya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 diharapkan para pelaku ekonomi kreatif merasakan kehadiran pemerintah yang mendukung serta bertanggung jawab dalam mewadahi para pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah mendorong kemajuan dalam ekonomi kreatif yang tercantum di dalam peraturan pemerintah seperti halnya dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pemasaran, infrastruktur, insentif, peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat bahkan sampai kepada penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembiayaannya <sup>8</sup>. Pembiayaan

---

<sup>5</sup> Google, "Memahami Analisis Pendapatan Iklan," Support.google.com, n.d., <https://support.google.com/youtube/answer/9314357?hl=id#zippy=%2Cmengapa-rpm-saya-lebih-rendah-daripada-cpm-saya%2Capa-perbedaan-antara-rpm-dan-cpm%2Cmengapa-rpm-penting%2Cbagaimana-saya-bisa-meningkatkan-rpm-saya%2Cjika-rpm-saya-naik-atau-turun-apa-artin.>

<sup>6</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

<sup>7</sup> Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" Vol. 23 Nomor 2 (2016): 229–38.

<sup>8</sup> I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, "Siaran Pers : Wamenparekraf: PP Nomor 24 Tahun 2022 Jadi Terobosan Regulasi Perkuat Ekraf Tanah Air," Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2022,

berbasis kekayaan intelektual dapat diajukan kepada lembaga keuangan baik bank maupun non bank sebagaimana yang tercantun dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Pada dasarnya hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki seseorang berdasarkan deklarasi tersebut. Hak dengan demikian melekat yang dapat diterapkan pada objek di bawah hukum perdata. Melakukan pendaftaran hak cipta di Indonesia bersifat opsional, yaitu pemberian hak milik atas suatu ciptaan tidak timbul dari pendaftaran, tetapi hak substantif timbul sehubungan dengan pendaftarannya.<sup>9</sup>

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 seharusnya menjadi angin segar mengenai hak cipta. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif berharap dengan diundangkannya Undang-Undang ekonomi kreatif selain meningkatkan perekonomian Indonesia, namun juga dapat membantu para pelaku kreatif untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan. Namun respon yang diberikan oleh lembaga keuangan hanya bersifat mendukung dan belum berani untuk mengimplementasikan konten youtube sebagai jaminan. Hal ini menjadi hal yang ingin peneliti kaji, Untuknya perlu dirumuskan dua rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana mekanisme nilai ekonomis konten Youtube sebagai jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. *Kedua*, bagaimana kepastian hukum bagi *content creator* youtube untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan.

### **Permasalahan**

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 seharusnya menjadi angin segar mengenai hak cipta. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif berharap dengan diundangkannya Undang-Undang ekonomi kreatif selain meningkatkan perekonomian Indonesia, namun juga dapat membantu para pelaku kreatif untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan. Namun respon yang diberikan oleh lembaga keuangan hanya bersifat mendukung dan belum berani untuk mengimplementasikan konten youtube sebagai jaminan. Hal ini menjadi hal yang ingin peneliti kaji, Untuknya perlu dirumuskan dua rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana mekanisme nilai ekonomis konten Youtube sebagai jaminan fidusia ditinjau dari Undang-

---

<https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-wamenparekraf-pp-nomor-24-tahun-2022-jadi-terobosan-regulasi-perkuat-ekraf-tanah-air>.

<sup>9</sup> Venantia Sri Hadiaranti, "Recording Copyright As a Guarantee Of Legal Satisfaction In" Vol. 1 Nomor 02 (2018): 5–9.

Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. *Kedua*, bagaimana kepastian hukum bagi *content creator* youtube untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis-normatif. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisa kebijakan mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia yang masih belum dapat dilaksanakan. Pada 12 Juli 2022 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-undang mengenai ekonomi kreatif, yang di dalamnya disebutkan bahwa youtube yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Sumber data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Informasi kunci berasal dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Industri Kreatif. Serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022. Informasi sekunder juga diperoleh dari peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dll. Teknik analisis data yang digunakan adalah teori Miles dan Huberman tentang reduksi data, penyajian data dan inferensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme nilai ekonomis youtube sebagai jaminan fidusia**

Barang yang menjadi jaminan wali amanat adalah saham, barang, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dalam pengertian yang lebih luas, benda yang dijamin dengan amanah adalah barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, yaitu barang tidak bergerak yang tidak dapat digadaikan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. *Trust Act* atau jaminan fidusia dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Konten Youtube sebagai karya atau ciptaan diakui sebagai hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 karena memasuki persyaratan yang telah disebutkan. Pengertian Hak Cipta berdasarkan undang-undang meliputi segala sesuatu yang diciptakan atau diproduksi meliputi warga negara indonesia maupun negaar asing baik perorangan maupun badan hukum dengan syarat yang pertama kali diterbitkan di indonesia. Konten youtube termasuk dalam perlindungan hak cipta memang tidak secara eksplisit dituliskan di dalam undang-undang, namun apabila ditarik dalam pengertian ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dapat dilindungi,

termasuk dalam karya sinematografi yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti halnya konten video yang terdapat dalam youtube termasuk ke dalam hak cipta yang dilindungi.

Pada umumnya jika berbicara tentang jaminan biasanya dikaitkan dengan pembiayaan atau kredit. Pengertian Pembiayaan menurut M. Syafi'i Antonio adalah memberikan fasilitas dana kepada pihak-yang kekurangan dana atau disebut dengan *deficit unit*<sup>10</sup>. Jaminan fidusia adalah jaminan khusus yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian antara debitur dan kreditur. Pelaku industri kreatif berhak mendapatkan pembiayaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melalui perjanjian penjaminan karya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>11</sup> Mengacu kepada Undang-Undang hak cipta, pasal 16 menyatakan bahwa manfaat yang bisa didapatkan dari kepemilikan hak cipta yaitu dapat dijadikan jaminan fidusia<sup>12</sup>.

Kaitannya dengan hak cipta, di dalamnya terdapat hak ekonomi yaitu pencipta memiliki manfaat ekonomi atas ciptaannya. Wujud untuk dapat diakui bernilai ekonomis, seorang *content creator* harus terlebih dahulu mendaftarkan akunnya untuk dimonetisasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu mengaktifkan akun untuk dimonetisasi, menghubungkan kanal youtube dengan akun *adsense*, akun yang diizinkan apabila dianggap *advertiser-friendly* artinya tidak mengandung unsur kekerasan atau ketelanjangan dan tidak melanggar hak cipta, mempersiapkan satu video atau beberapa video tertentu untuk menjadi acuan Google untuk menilai berapa pendapatan dari akun youtube.

Konten youtube yang telah mendaftarkan akunnya untuk dimonetisasi biasanya telah mendapatkan iklan, sehingga akun youtube tersebut telah memiliki nilai ekonomis dan dapat dijadikan sebagai jaminan pada pembiayaan. Karena hak cipta bersifat deklaratif, sehingga tanpa didaftarkan pun konten youtube tetap melekat padanya. Namun sesuai dengan perundang-undangan yang terbaru tentang ekonomi kreatif bahwasannya kekayaan intelektual yang

---

<sup>10</sup> Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia."

<sup>11</sup> Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif," 2022.

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2014.

dapat dijadikan jaminan harus didaftarkan terlebih dahulu pada kantor kementerian hukum dan HAM<sup>13</sup>.

Untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan baik bank ataupun non bank, syarat dan ketentuannya tercantum dalam pasal 4 sampai 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Suatu barang yang dapat dijadikan jaminan fidusia harus terlebih dahulu diakui secara yuridis. Diakui secara yuridis dapat dilakukan dengan pendaftaran sesuatu yang ingin dapat dijamin. Ada lima syarat untuk dapat mendaftarkan jaminan, yaitu menyiapkan akta jaminan di hadapan notaris, kemudian mendaftarkan akta di kantor pendaftaran perwalian yang merupakan bagian dari departemen administrasi hukum umum kementerian hukum dan hak asasi manusia, selanjutnya membayar biaya pendaftaran, kemudian diterbitkannya perwalian atas akta yang didalamnya terdapat hak eksekusi, terakhir sertifikat jaminan wali amanat dan sertifikat jaminan wali amanat memuat nilai benda dan nilai benda jaminan dari benda wali amanat<sup>14</sup>.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Kontrak Jaminan Real Estat Bab II Ayat 3 Tentang Pendaftaran Jaminan yang Dapat Dikurangi menjelaskan bahwa permohonan klaim jaminan fidusia memuat hal-hal sebagai berikut: Identitas kreditur dan penerima, tanggal, nomor ikatan perwalian, nama dan alamat notaris dengan ikatan perwalian, perincian kontrak utama yang dijamin oleh ikatan perwalian, uraian hal-hal yang menjadi subjek ikatan perwalian, nilai penjamin dan nilai barang yang menjadi jaminan terpercaya. Waktu yang diperlukan untuk proses ini maksimal 30 hari sejak dibuatnya perjanjian perwalian<sup>15</sup>.

Lembaga penjaminan atau jasa penilai publik yang terkenal biasanya dimintai pendapat untuk penilaian benda-benda yang dijadikan agunan. Penilai Publik adalah profesional pendukung independen di industri keuangan yang memberikan pendapat profesional atas nilai keuangan Barang yang dijamin. Termasuk ke dalam jasa penilai publik dapat berupa badan hukum yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, hal ini tercantum dalam Keputusan

---

<sup>13</sup> Vinka Kurnia Dewi and Ferdiansyah Putra Manggala, "Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)," *Inicio Legis* 3, no. 2 (2022): 116–26.

<sup>14</sup> Reni Budi Setianingrum, 'Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia'.

<sup>15</sup> Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia," *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 2015.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Penilai Publik <sup>16</sup>. Rincian dari penilaian bisnis salah satunya adalah hak kekayaan intelektual dan aset tak berwujud. Selain itu juga terdapat kerugian ekonomis yang timbul serta opini kewajaran yang dapat diperhitungkan.

Namun dalam peraturan Bank Indonesia pembebanan agunan dalam pembiayaan meliputi surat berharga dan saham aktif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang diikat secara gadai, tanah, bangunan dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan, mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 m<sup>3</sup> diikat dengan hipotek, kendaraan bermotor diikat dengan fidusia dan resi gudang dengan hak jaminan atas resi gudang <sup>17</sup>. Dalam Peraturan Bank Indonesia memang belum mencantumkan mengenai hak cipta yang dapat dijadikan agunan pembiayaan.

Hak cipta pada dasarnya memiliki dua hak yang mengikutinya yaitu ekonomi dan hukum, hal ini sama dengan kekayaan intelektual lainnya seperti merek dagang, paten, dan rahasia dagang. Tiga metode penilaian jaminan yang diterima secara umum yaitu pendekatan biaya, pendapatan serta pasar dan hal ini juga berlaku untuk analisis nilai hak cipta. Pendekatan pendapatan dan pasar biasanya lebih sering digunakan daripada pendekatan biaya. Hal ini dikarenakan pendekatan biaya biasanya memberikan harga minimum terhadap suatu karya. Selain itu hak cipta memberikan hak monopoli kepada pemiliknya, sehingga pendekatan berbasis biaya tidak selalu sesuai untuk menganalisis penilaian hak cipta. <sup>18</sup>.

Metode nilai pasar juga memiliki hambatannya tersendiri seperti sulitnya menganalisis nilai eceran hak cipta. Karena metode ini menggunakan perbandingan harga pasar dengan nilai sekuritas, nilai transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud yang seringkali dirahasiakan. Sedangkan metode pendapatan menilai berdasarkan pendapatan masa depan yang akan dihasilkan oleh kekayaan intelektual. Namun jika metode ini diterapkan akan terjadi hambatan juga karena sulitnya mengukur berapa pendapatan yang akan didapatkan di masa depan, terlebih jika aset tidak berwujud biasanya nilai ekonomisnya bersifat fluktuatif.

---

<sup>16</sup> Kementerian Keuangan RI, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Penilai Publik," *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 2019.

<sup>17</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum," *Peraturan Bank Indonesia*, 2012.

<sup>18</sup> Katherine A Gilbert, "The Valuation Of Copyright-Related Intangible Assets," *Autumn*, 2009.

Melalui Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa pemerintah memfasilitasi bantuan perhitungan untuk penilaian kekayaan intelektual untuk nilai aset tidak berwujud dengan memberikan bantuan untuk perhitungan aset secara langsung melalui program utilitas berbasis sampel dengan membentuk atau melibatkan kantor penilai kekayaan tidak berwujud dalam industri kreatif berdasarkan hak kekayaan intelektual. Namun, dalam praktiknya, belum adanya pedoman untuk menilai nilai ekonomi benda tak berwujud seperti hak cipta. Standar-standar ini mungkin terbatas pada standar undang-undang tanpa memberikan aturan baku yang jelas. Sehingga menjadikan akun youtube sebagai jaminan fidusia masih belum bisa diterapkan karena masih diperlukan lagi peraturan-peraturan lain yang mendukung.

## **2. Kepastian hukum bagi *Content Creator* Youtube Untuk Mendapatkan Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan**

Hak cipta sebagai jaminan memang diadopsi dari negara barat. Hasil pertemuan ke-13 *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) tahun 2008 menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual sudah dapat diagunkan untuk mendapat pembiayaan perbankan secara internasional. Kemudian diadopsi oleh Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 16 ayat 3 bahwasannya hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia<sup>19</sup>. Seperti yang sudah dijelaskan diatas pasal 40 mengenai berbagai macam hak cipta konten youtube termasuk dalam karya sinematografi, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti halnya konten video yang terdapat di dalam youtube. Sehingga menurut peraturan perundang-undangan konten youtube yang sudah memenuhi persyaratan monetisasi dan pendaftaran akta jaminan fidusia dapat melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan bank maupun non bank dengan mengagunkan sertifikat jaminan fidusia.

Jangka waktu perlindungan hak cipta atas sinematografi adalah 50 tahun sejak dilakukan pengumuman. Rahmi Jened menjelaskan bahwasannya hak cipta lebih mengedepankan originalitas (*originalty*) daripada pembaharuan (*novelty*) sehingga padanya melekat *stelsel* deklaratif. Anggapan hukum timbul terhadap pemakai pertama sampai terbukti sebaliknya<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

<sup>20</sup> Rahmi Jened, “Webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang” (Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan, 2022), [https://www.youtube.com/watch?v=2PW4QIJK7\\_U&t=910s](https://www.youtube.com/watch?v=2PW4QIJK7_U&t=910s).

Pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan bank ataupun non bank bahwasannya kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan hutang. Makna dari objek jaminan hutang yaitu jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif dan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022<sup>21</sup>.

Pemerintah memberikan dukungan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pada 12 Juli 2022. Tertulis di dalamnya apabila ingin mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual maka persyaratan yang harus dipenuhi seperti adanya proposal hibah, memiliki usaha yang juga berbasis dalam ekonomi kreatif, sudah memiliki perjanjian kekayaan intelektual untuk produk ekonomi kreatif, dan yang terpenting sudah memiliki surat pendaftaran atau biasa disebut dengan sertifikat kekayaan intelektual<sup>22</sup>.

Pada prakteknya agunan yang dapat di terima pada bank syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk pembiayaan yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), Akta Jual Beli (AJB) atau *Letter Credit* (Raida, *customer service*, 10 Oktober 2022). Hak cipta sebagai agunan belum bisa diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kesenjangan antara peraturan tentang cipta dengan kejelasan komunikasi yang terjadi di lapangan.

Salah satu hambatan yang dihadapi ketika menjadikan konten youtube sebagai jaminan yaitu maraknya pembajakan konten. Hal ini dapat mengurangi nilai ekonomis dari suatu karya kreatif. Untuk menanggulangi hal tersebut youtube telah memberikan perlindungan hukum yang legal seperti *Copyright Match Tool* (CMT), program *verifikasi* konten dan *Content ID*. Karya cipta yang telah terjadi pembajakan maka *content creator* dapat melakukan pelaporan dan meminta penghapusan karya yang dibajak pada *website youtube studio*, selain itu juga dapat melakukan gugatan ganti rugi dan permohonan putusan sela serta melakukan tuntutan secara pidana.<sup>23</sup>

Kemungkinan seseorang cidera janji atau wanprestasi ketika melakukan suatu pembiayaan pasti ada. Apabila terjadi sengketa para pihak dapat

---

<sup>21</sup> Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif."

<sup>22</sup> Presiden Republik Indonesia.

<sup>23</sup> Aura Mayshinta and Muh. Jufri Ahmad, "Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube," *Jurnal Penelitian*, 2023, 1–9.

menyelesaikannya melalui pengadilan, di luar pengadilan atau lembaga alternatif yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan. Langkah-langkah yang bisa diupayakan untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusia yaitu dengan cara: *pertama*, pelaksanaan titel eksekutorial. Cara ini memungkinkan penerima fidusia untuk dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. *Kedua*, dengan melakukan pelelangan umum. *Ketiga*, melalui perjanjian bawah tangan, Cara ini dapat dilaksanakan satu bulan setelah sponsor dan penerima jaminan memberitahukan kepada pihak terkait secara tertulis dan dimuat minimal 2 surat kabar daerah.

Terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, hal itu akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada pasal 30 dijelaskan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi tanggungan fidusia dalam rangka menjalankan eksekusi barang jaminan. Penjelasan pasal ini adalah bahwa wali amanat berhak mengambil barang yang tunduk pada ikatan perwalian jika pemberi hibah tidak menyerahkan barang yang tunduk pada ikatan perwalian pada saat pelaksanaan. Menjamin dan dapat mengajukan bantuan pemerintah jika diperlukan.

Istilah "otoritas" memiliki banyak interpretasi untuk mencari bantuan dari polisi. Perjanjian perwalian adalah hubungan hukum perdata (pribadi) sehubungan dengan pemrosesan jaminan perwalian. Oleh karena itu, kewenangan polres hanya sebatas memastikan penegakan hukum bilamana perlu, tidak dalam ruang lingkup penegakan hukum, kecuali merupakan kegiatan yang menyangkut masalah pidana, maka polres yang baru memiliki kewenangan penegakan hukum pidana. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, oleh karena itu, diartikan sebagai "pengadilan negeri" sebagai badan yang dimintai bantuan untuk melaksanakan penegakannya. bahwa sesuai keputusan nomor 71/PUU-XIX/2021 pada rapat keputusan tanggal 24 Februari 2021<sup>24</sup>.

Dengan penjernihan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka tercipta kepastian hukum berdasarkan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan hak atas perlindungan diri, keluarga dan martabat manusia dihapuskan. Kekayaan Intelektualbatnya, pemenuhan jaminan amanah dengan titel pelaksana dalam artian dengan adanya Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 sudah tidak relevan lagi.

---

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 71 PUU-XIX/2021 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *MKRI*, 2021.

Hak cipta sebagai jaminan masih memiliki kekurangan dalam penerapannya di industri, sehingga harus ditingkatkan dengan menyediakan platform untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual, menyiapkan sistem untuk mendaftarkan peluang keuangan bagi pelaku industri kreatif dan Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu pariwisata dan Industri Kreatif/Industri Pariwisata dan Industri Kreatif dan Pemasaran akan dibentuk untuk mendorong penyedia data yang digunakan sebagai jaminan untuk menyusun dan mempromosikan peraturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung penerapan insentif fiskal dan non-fiskal bagi para profesional kreatif.

Mendorong pelaku ekonomi untuk meningkatkan keterampilan profesi penilai kekayaan intelektual agar dapat melakukan penilaian, sistem elektronik antar departemen/instansi yang mengedepankan integritas. Hal ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang mendukung pembiayaan dan pemasaran berbasis kekayaan intelektual, dan sistem pemasaran kekayaan intelektual<sup>25</sup>. Meskipun dalam perundang-undangan telah menyebutkan dapat menjaminkan konten youtube sebagai jaminan fidusia, namun perlu kajian lebih lanjut tentang bagaimana mengimplementasikannya. Sehingga azas kepastian hukum dapat tercapai oleh seluruh pihak yang terkait.

## KESIMPULAN

Konten youtube sebagai jaminan fidusia sebenarnya telah mendapatkan kepastian hukum sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dijelaskan pemerintah memfasilitasi bantuan perhitungan untuk kekayaan intelektual, namun dalam penerapan peraturan tersebut masih memiliki banyak celah. Sehingga diperlukan sistem atau aturan baku yang mengatur dengan eksplisit bagaimana menilai secara ekonomis tentang kekayaan intelektual.

Terkait kepastian hukum mengenai *content creator* untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan sebenarnya diatur secara jelas pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 bahwa kekayaan intelektual yang mana konten youtube termasuk di dalamnya dapat dijadikan jaminan hutang pada lembaga keuangan bank maupun non bank.

## DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>25</sup> Hendriyani, "Siaran Pers : Wamenparekraf: PP Nomor 24 Tahun 2022 Jadi Terobosan Regulasi Perkuat Ekraf Tanah Air."

- Annur, Cindy Mutia. "YouTube Kantongi Pendapatan US\$7,34 Miliar Pada Kuartal II-2022." Katadata.co.id, 2022.
- Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum." *Peraturan Bank Indonesia*, 2012.
- Bayu, Dimas. "Jumlah Pengguna Youtube Di Dunia." Dataindonesia.id, 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-youtube-di-dunia-capai-241-miliar-pada-kuartal-ii2022>.
- Budi Setianingrum, Reni. "Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 229–38.
- Dewi, Vinka Kurnia, and Ferdiansyah Putra Manggala. "Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)." *Inicio Legis* 3, no. 2 (2022):
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wawan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia, Nyoman Darmasha, Nyoman Mudana, Sagung Wiratni Dharmadi, Ida Ayu Sukihana, Sri Indrawati, and Putra Atmadja. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Gilbert, Katherine A. "The Valuation Of Copyright-Related Intangible Assets." *Autumn*, 2009.
- Google. "Memahami Analisis Pendapatan Iklan." Support.google.com, n.d..
- Hadiarianti, Venantia Sri. "Recording Copyright As a Guarantee Of Legal Satisfaction In" 1, no. 02 (2018).
- Hendriyani, I Gusti Ayu Dewi. "Siaran Pers : Wamenparekraf: PP Nomor 24 Tahun 2022 Jadi Terobosan Regulasi Perkuat Ekraf Tanah Air." Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2022.
- Jened, Rahmi. "Webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang." Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.
- Kementerian Keuangan RI. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Penilai Publik." *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 71 PUU-XIX/2021 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *MKRI*, 2021.
- Mayshinta, Aura, and Muh. Jufri Ahmad. "Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube." *Jurnal Penelitian*, 2023.
- Patonah, Muhammad Alawa. "Risiko Menjadi Konten Kreator Youtube Di Era Sekarang." Kompasiana, 2022.
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusiadan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia." *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 2015.
- . "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif," 2022.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2014.

Riyanto, Andi Dwi. "Data Digital Indonesia Tahun 2022." Kompasiana, 2022.

Setianingrum, Reni Budi. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" Jurnal Media Hukum, 23, no. 2 (2016).